

NKRI Versi Muhammad Natsir (Analisis Relasi Agama dan Negara di Indonesia)

Oleh: Marzuki, M.Sos
Marzukimanurung07@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that embraces the ideology of Pancasila as the basis of the state. Where in the first precepts are the precepts of the Godhead, this indicates that Indonesia is a godly and religious country not a secular state that separates religion and state, or religion as an obstacle in practicing Pancasila as what the BPIP chairman Yudian Wahyudi said. The purpose of this research is to see how the relation between religion and the state which is now aggressively banged on by a group of people. The focus on this research is to see how Muhammad Natsir's views are known as a religious nationalist figure who helped express the ideology and foundation of the state. The method used in this study uses library research with a historical approach. In this study it was found that Natsir did not contradict Pancasila with Islam because the five precepts, the principle of divinity, unity, humanity, deliberation and social justice were part of Islamic teachings.

Keywords: M. Natsir, Religion, Country, Homeland.

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan menganut ideologi pancasila sebagai dasar negara. Dimana pada sila pertama terdapat sila Ketuhanan, ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang bertuhan dan beragama bukan negara yang sekuler yang memisahkan agama dan negara, atau agama sebagai penghambat dalam mengamalkan pancasila sebagai mana yang utarakan ketua BPIP Yudian Wahyudi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah melihat bagaimana relasi agama dan negara yang kini gencar-gencarnya dibenturkan oleh sekelompok orang. Fokus pada penitian ini melihat bagaimana pandangan Muhammad Natsir yang dikenal sebagai seorang tokoh nasionalis religius yang turut mengutarakan ideologi serta dasar negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah (*history approach*). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Natsir tidak mempertentangkan pancasila dengan Islam karena kelima sila itu, sila ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah serta keadilan sosial adalah bagian dari ajaran Islam.

Kata Kunci: *M. Natsir, Agama, Negara, NKRI.*

PENDAHULUAN

Pada lustrum terakhir ini, dibenturkan kembali mengenai hubungan agama dan negara. Benturan itu sangat mencuat di tanah air ketika ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan bahwa agama merupakan musuh terbesar pancasila. Pernyataan yang kontroversi tersebut membuat darah tokoh agama maupun tokoh bangsa menggelegar yang mengetahui sejarah lahirnya bangsa Indonesia mendidih hangat hingga ke ujung rambut.

Dilihat dalam sejaranya, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari jerih paya serta usaha rakyat Indonesia dengan rela mengorbankan harta, bahkan nyawa demi merebut bangsa ini dari tangan penjajah. Perjuangan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang mayoritasnya adalah agama Islam dengan persentase lebih kurang 90% jumlahnya dan ditambah 10% oleh tokoh agama-agama lainnya.¹

Pernyataan mantan rektor UIN Yogyakarta yang membangunkan macan tidur itu ditanggapi berbagai kalangan dimasyarakat. Misalnya Syarif Hasan wakil ketua MPR RI sebagaimana dikutip dalam detiknews, dia menyatakan bahwa pendapat tersebut –Yudian Wahyudi-- sangat keliru, karena sejak dulu hingga kapanpun pancasila tidak memusuhi agama, begitu juga sebaliknya agama tidak mungkin memusuhi pancasila.

Tanggapan yang senada juga disampaikan oleh Menkopolkam, Prof. Mahfud MD, yang disampaikan pada penutupan Indonesia Lawyers Club pada 18 Februari 2020 di tvOne, beliau menyatakan bahwa pancasila ini tidak bermusuhan agama dan agama tidak bermusuhan dengan pancasila. Lanjut beliau, justru pancasila merupakan nilai-nilai agama kemudian mengkristalisasi menjadi ideologi seperti yang terdapat dalam pancasila sendiri, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia ini bukanlah hal yang baru, melainkan kisah lama yang terulang kembali. Dilihat dari salah satu episode sejarah perjalanan perkembangan bangsa Indonesia. Pada akhir-akhir tahun 30-an Soekarno awalnya mengusulkan bahwa ideologi bangsa Indonesia harus berideologi sekuler total, akan tetapi perdebatan itu menghasilkan bahwa Indonesia tidak negara sekuler dan bukan pula negara agama.

¹Amad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Jakarta: Suryadinasti, cet. 4, 2018), h. 13.

Pada tahun 1938, berita mengejutkan bagi kaum agamawan datang menghampiri mereka melalui majalah Panji Islam, bahwa Soekarno menulis sebuah artikel *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama Dengan Negara*. Artikel ini berisi sebuah usulan Soekarno jika kelak Indonesia merdeka maka Indonesia harus memisahkan diri dari antara agama dengan negara. Soekarno melihat bahwa agama dan negara jika digabungkan maka akan mengalami kemunduran sebagaimana dengan halnya dengan Turki dibawah kendala Mustafa Kemal Attarturk yang ia lihat pada masa itu.²

Menanggapi tulisan Soekarno dari majalah tersebut, Muhammad Natsir berpendapat sebaliknya, tulisannya yang dimuat di Harian Al-Manar dan Panji Islam selanjutnya di dikutip oleh majalah-majalah lainnya. Adapun tulisan Natsir diantaranya berjudul, *Arti Agama dalam Negara, Mungkinkah Quran Mengatur Negara, Islam "Demokrasi", Kemal Pasya dan Vrijmetselarij, Syekh yang Maha Hebat, Mengasih Islam Bersinggasana di Kalbu, dan Berhakim Kepada Sejarah*. Semua karya-karyanya itu dapat dibaca dalam buku *Kapita Selekta*.³

Dari sikap Soekarno di atas menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler. Menurut Syadzali kelihatan terlampau pagi mengagumi Mustafa Kemal dalam mengambil sistem kenegaraan Republik Turki. Barangkali Soekarno belum membaca atau belum sempat membaca buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* karya Ali Abd Raziq, yang digunakannya sebagai sandaran sekulerismenya dalam bernegara. Tulisan Ali Abd Raziq itu tidak dapat meyakini kita bahwa nabi Muhammad adalah nabi atau rasul semata yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Akan tetapi Muhammad Natsir berbeda jauh dengan Soekarno mengenai rencana pembentukan ideologi kenegaraan. Dikutip dari Syadzali bahwa Natsir berpendirian bahwa negara jika ingin maju dan demokratis, karena Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam bukanlah sekedar agama yang mengatur antara manusia dengan Tuhan melainkan juga mengatur segala aspek kehidupan manusia secara *kaffah* termasuk politik dan kenegaraan. Memang terlepas dari ada atau tidaknya perintah mendirikan negara, akan tetapi patokan-patokan mengatur sebuah negara telah ditentukan dalam Alquran maupun Hadis, supaya

²Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 191.

³*Ibid.*

negara menjadi subur dan makmur sehingga rakyatnya menjadi sejahtera, dengan itulah terwujudnya tujuan hidup umat manusia.

Pemikiran kedua tokoh tersebut terus bergulir hingga menjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI yang dibentuk pada tahun 1945, dan perdebatan mengenai ideologi negara disidang pertama dan disidang panitia sembilan. Yang kemudian melahirkan kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama tetapi bukan pula negara sekuler. Akan tetapi negara ini adalah negara kesepakatan (*modus defendi*), bahwa negara ini bersumber dari nilai-nilai agama. Setelah diproklamkan Republik ini secara resmi, Belanda datang mengobrak-abrik Republik ini dengan menjadi 17 negara bagian, hal ini juga disebabkan dari dampak Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.⁴ Natsir melihat cara yang dilakukan Belanda ini adalah cara untuk kembali menjajah Indonesia. Dengan itulah seorang sosok yang dikenal ikhlas berjuang demi persatuan bangsanya, maka dengan Mosi Integral dari Natsir republik ini menjadi NKRI, sehingga KH. Syuhada Basyri yang menyatakan jika tidak ada Natsir yang menyatukan NKRI mungkin hingga saat ini NKRI tidak ada.

Dengan demikian keberadaan Republik ini ada dua proklamasi yang diproklamkan oleh Soekarno. Proklamir pertama yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 di rumah Faraj bin Said Martak merupakan seorang saudagar Arab-Indonesia yang menghibahkan rumahnya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 kepada Soekarno guna dimanfaatkan untuk kemerdekaan Indonesia. Proklamir kedua dibacakan pada 15 Agustus 1950 dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia Serikat.⁵

Maka sangat disayangkan, kita sering menyebut NKRI harga mati, namun tidak mengungkapkan yang sebenarnya bagaimana NKRI itu diraih dan siapa yang meraihnya, itu jarang diungkapkan dalam buku-buku sejarah disekolah-sekolah. Ini bukan berarti membuka luka lama yang kini berdarah kembali, namun sebagai anak bangsa yang merasa peduli akan perlunya pelurusan sejarah yang sebenarnya yang pernah diperjuangkan oleh anak bangsa. Dengan itulah penulis ingin mengangkat tema di tulisan yang sederhana ini.

⁴Helbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), h. 121.

⁵*Seri Tempo, Natsir: Politik Santun Diantara Dua Rezim*, (Jakarta: Kepustakaan Polpuler Gramedia, 2011), h. 56-57.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah (*history approach*). Dengan kata lain bahwa instrumen merekonstruksikan peristiwa sejarah menadikan sejarah sebagai kisah. Dalam cakupannya pendekatan ilmu sejarah, maka pada dasarnya tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan 5W+1H. Apa (*what*) yang terjadi?, kapan (*when*) peristiwa itu terjadi?, dimana (*where*) peristiwa itu terjadi?, mengapa (*why*) peristiwa itu terjadi?, siapa (*who*) yang terlibat dalam peristiwa itu?, serta bagaimana (*how*) proses terjadinya peristiwa itu?.

Dari pertanya-pertanyaan itulah dibahas permasalahannya sehingga menghasilkan jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut. Dalam pendekatan searah ini diupayakan dapat menghasilkan eksplanasi (kejelasan) mengenai aignifikansi (arti penting) dan makna peristiwa.

BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR

Muhammad Natsir lahir di Alahanpanjang, Solok Sumatera Barat tepatnya pada 17 Juli 1908 dan wafat di Jakarta pada 06 Februari 1993. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sutan Saripado merupakan seorang juru tulis di sebuah kantor di Alahan Panjang, dan ibunya bernama Khadijah. Natsir memiliki tiga saudara, Yukinan, Rubiah dan Yuhanusun. Pendidikan formalnya ia mulai sejak depalan tahun di sekolah HIS (*Hollandse Inlandse School*) Adabiyah Padang, sebuah sekolah yang berdiri pada 23 Agustus 1915 oleh seorang pembaharu Minangkabau bernama Dr. H. Abdullah yang secara pemikiran banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh.⁶

Pada tahun 1923 Natsir lulus di HIS, lalu melanjutkan di MULO (*Middlebare Uitgebreid Lager Onderwijs*), atau setingkat dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tidak sembarangan orang yang bisa belajar di MULO melainkan harus memiliki pengetahuan prima seperti mampu berbahasa Belanda, dan bisa juga anak terpandang. Di sini Natsir sudah mengenal JIB (*Jong Islamaten Bond*) cabang Padang pada ketika itu Sanusi Pane sebagai ketua yang belakangan ini dikenal sebagai sastrawan.

⁶Jatim, *Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman*, (STIAU Al-Mujtama' Pamekasan), h. 128.

Sebagai anak Minangkabau mengaji Alquran di sore hari, besar di Surau, pintar bermain Silat, dan suka merantau merupakan aktifitas mereka. Setelah selesai pendidikan formalnya di Minangkabau, pada tahun 1927 ia melanjutkan pendidikannya di sekolah AMS (*Algemene Middlebare School*) Bandung atau sekarang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁷ Disinilah Natsir menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti Sejarah Peradaban Islam, Romawi, Yunani, Persia dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab, Inggris Prancis, dan Latin. Pada usia 21 tahun Natsir sudah menguasai lima bahasa seperti bahasa Arab, Belanda, Inggris, Prancis dan Latin, serta ditambah dua bahasa daerah Minangkabau dan Sunda.⁸

Di AMS Bandung sekolah inilah ia berguru dengan Ahmad Hassan, salah satu tokoh Persis yang komitmen dalam membela kebenaran dan keadilan. Natsir menyadari bahwa Muhammad Abduh merupakan salah seorang pembaharu Mesir yang sangat berpengaruh pada dirinya. Selain itu juga sosok Agussalim yang sama-sama berasal dari ranah Minang juga sangat mempengaruhi pandangannya tentang Islam dan modernitas.

Di Bandung Natsir memulai bakat politiknya serta melanjutkan wawasan keislamannya bergabung dengan Jong Islameten Bond (JIB) yang didirikan oleh Sjamsurijal. Dengan keseriusannya dalam berorganisasi, ia pernah sempat menjabat sebagai ketua umum di Bandung. Di sini Agussalim sebagai mentor dalam memberikan sentuhan keislaman kepada kau terpelajar JIB seperti Muhammad Roem, Yusuf Wibisono, Kasman Singosudibjo, termasuk juga Muhammad Natsir, yang semua mereka kelak menjadi pejabat teras partai Masyumi.

Tokoh lain yang mempengaruhi kepribadian Natsir adalah Syekh Ahmad Soekarti, merupakan seorang pendiri Al-Irsyad yang sangat keras dalam menentang diskriminasi dan eksklusivisme kaum sayid. Dengan belajar ilmu agama, bersinergilah etika dan moralnya yang dijaga oleh keimanan yang kuat sehingga sosok Natsir dikenal sebagai seorang yang tangguh dalam berjuang, jujur dalam bertindak, dan lebih mengutamakan kesederhanaan.⁹

⁷Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. II, h.

⁸Jatim, *Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman*, (STIAU Al-Mujtama' Pamekasan), h. 123.

⁹Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, (Jakarta: IKAPI, 2017), h.303.

Ketika Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1946, ia bersama keluarganya tinggal di rumah sahabatnya bernama Prawoto Mangkusaswito yang beralamat di Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, keluarga Natsir menumpang di Paviliun milik Haji Agus Salim yang terletak di Jalan Gereja Theresia –sekarang Jalan Agus Salim. Pindah dari rumah satu kerumah yang lain berakhir ketika pemerintah membelikan rumah tanpa perabotan dari saudagar Arab kemudian diserahkan kepada Menteri Penerangan tersebut.

Ketika di berugas di Yogyakarta, Natsir bertemu dengan guru besar dari Universitas Cornell George McTurnan Kahin, sehingga Kahin menyatakan ‘pakaian Natsir tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan’ tulis Kahin dalam bukunya ketika memperingati 70 Muhammad Natsir. Yang mengejutkan lagi Natsir hanya memiliki dua setel jas bertambal dan sudah butut. Hal ini Kahin dapatkan informasinya dari Agus Salim mengenai sosok Natsir. Belakangan diketahui bahwa staf Menteri Penerangan pernah mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka kelihatan pantas sebagai seorang menteri.¹⁰

Penampilan sang sederhana yang berhati tulus itu tidak berubah ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada Agustus 1950. Sebagai seorang tokoh memiliki jiwa kesederhanaan, Natsir yang ketika itu menjabat sebagai anggota Parlemen dan memimpin Fraksi Masyumi pernah menolak tawarkan mobil Chevrolet Impala dari seorang tamu dari Medan, sedan buatan Amerika ini tergolong kendaraan mewah pada masa itu. Natsir sudah merasa cukup atas mobil pribadinya bermerek DeSoto yang sudah kusam akibat sengat matahari dan ditelan masa.

Tidak hanya sampai disitu kesederhanaan Natsir sebagai pejabat negara yang sanggup memakai jas bertambal, sikap Natsir yang sederhana ini seharusnya menjadi contoh pejabat di negeri ini. Natsir melakukan hal itu bukan karena pencitraan supaya dapat perhatian atau cari perhatian masyarakat banyak, semua itu ia lakukan atas sinergitasnya antara iman dan amal yang ia miliki. Sikap zuhud mengkristal dalam dirinya sehingga ia tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi dan keluarganya, yang kini sikap zuhudnya itu sangat langka ditemukan bagi pejabat republik ini.

¹⁰*Ibid.*

PRESTASI GEMILANG NATSIR

Sebagai berjiwa patriotik, ada banyak persetasi gemilang Natsir yang ia persembahkan demi bangsa Indonesia, diantaranya: *pertama*, Mosi Integral Natsir yang mengembalikan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan ulah tangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, menyelesaikan masalah Irian Barat. *Ketiga*, mencairkan hubungan Indonesia Malaysia.

Natsir bukan saja sebagai sosok ulama namun juga sebagai negarawan serta diplomat ulung yang handal baik dalam maupun diluar negeri, akan tetapi lebih daripada itu ia berkiprah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya. Datuk Sinaro Panjang gelar yang disematkan kepadanya mampu menyatukan NKRI kembali yang pada ketika itu pemerintah Indonesia terpecah belah menjadi negara-negara bagian atau federal yang dibuat oleh Van Mook.¹¹

Mosi Integral yang dilakukan oleh Natsir ini merupakan prestasi gemilang yang pernah ia raih yang kini mulai dilupakan oleh sejarah. Mosi ini tidak lahir begitu saja jika tanpa dibarengi dengan usaha yang maksimal tanpa memikirkan apa yang didapat setelah berkerja. Kerja ikhlas yang dilakukan oleh ulama sekaligus negarawan itu, Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan atas kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan 23 Agustus - 2 Nopember 1949 di Den Haag Belanda. Natsir dikala itu menjabat sebagai Menteri Penerangan yang turut menolak hasil KMB tersebut dan disertai juga Agus Salim sebagai Mentri Luar Negeri.¹²

Dalam menghadapi masalah Irian Barat. Natsir berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI yang pada mulanya yang dikala itu dalam kekuasaan Belanda, Soekarno sebagai presiden menginginkan dengan pendekatan bersejata untuk mendapatkan Irian Barat. Namun Natsir yang menjabat sebagai perdana menteri pertama menolak cara yang di rencanakan Soekarno, ia lebih mengutamakan pendekatan perundingan, karena RI masih terikat dengan hasil KMB. Pada akhirnya, diambilhah pemungutan suara secara demokrasi dengan 17 orang kabinet, alhasil 12

¹¹Lihat dalam Artikel Hidayatullah, karya Hadi Nur Rahman, *69 Tahun Mosi Integral: Mengenang Perjuangan M Natsir*, ahad 31 Maret 2019.

¹²*Ibid.*

orang mendukung cara Natsir dan 5 orang lagi mendukung cara Soekarno. Sejak itulah, menurut Natsir yang dikutip Iqbal hubungan Natsir dengan Soekarno menjadi retak.

Selain daripada itu, Natsir mencairkan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang dikala itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat ulah Soekarno yang melancarkan operasi “Ganyang Malaysia”. Ketika itu Natsir berada dalam kerangkeng juruji besi rezim Orde Lama yang dianggapnya Natsir melawan arus dengan mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Enam tahun Natsir meringkuk dalam penjara, kemudian begitu tenggelam rezim Orde Lama.

Pada awal kekuasaan Soeharto, beliau ingin memulihkan hubungan Indonesia dengan Malaysia yang retak itu dengan mengutus Ali Moertopo dan Leonardus Benny Moerdani. Pemerintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utusan itu, akan tetapi Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman meninggalkan Kuala Lumpur sebelum delegasi dari Jakarta datang. Misi Ali dan Benny Gagal, Natsirlah yang diharapkan. Ia dikenal dekat dengan Tengku Abdul Rahman dan pernah bertemu beberapa kali. Sebagaimana dikutip oleh Tempo, Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan Indonesia dengan Malaysiam Natsir menjawab dalam surat pendek: “ini adalah niat baik pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia, mudah-mudahan Tengku bisa menerimanya”.¹³

Sofjar membawa surat yang ditulis tangan oleh Natsir, atas bantuan Tan Sri Ghazali Syafii, hingga surat tersebut sampai ke tangan Tengku Abdul Rahman. Setelah membaca surat dari Natsir tersebut, Tengku berkata “Datanglah mereka besok di tempat saya”. Besoknyapun delegasi Indonesiapun datang, hubungan kedua negara tersebut berangsur cair.¹⁴

Walaupun hanya tamat SMA, Natsir memiliki kemampuan diplomatik yang handal itu dan menguasai berbagai bahasa, terus menjalin kerjasama dalam maupun luar negeri demi kepentingan bangsa Indonesia. Dalam mencetuskan pendirian Bank Islam Dunia Natsir merupakan perwakilan dari Indonesia. Termasuk juga pendirian nniversitas swasta di berbagai daerah termasuklah di dalamnya pembangunan kampus UISU di Medan.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Seri Tempo, Natsir: Politik Santun diantara Dua Rezim*,h. 98-99.

Setidaknya itulah prestasi besar yang diraih oleh Natsir yang penulis temukan saat ini, barangkali dengan kerendahan hati penulis diharapkan pembaca dapat memberikan masukan dan tambahan mengenai hal ini.

HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA

Mengenai hubungan agama dan negara, Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa Soekarno menginginkan negara dipisahkan dengan agama, karena ia memandang bahwa agama merupakan urusan spiritual pribadi seseorang, sedangkan negara adalah urusan umat manusia. Pendapat Soekarno tersebut sebagaimana yang ia kutip dari pemikiran Ali Abd Raziq merupakan seorang ulama Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang berpandangan kiri Islam kiri (sekuler). Menurutnyanya tidak ada dasar baik itu dalam Alquran maupun Sunnah serta Ijma' ulama keharusan dalam menyatukan agama dan negara. Ia melihat bahwa kemajuan Republik Turki dibawah kesekuleran Mustafa Kemal Ataturk.¹⁵

Berbeda dengan Natsir. Natsir berpendapat bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Menurutnyanya memang tidak ada ayat Alquran maupun Hadis Nabi membahas tentang persoalan teknis, yang kini menurut Iqbal tentang penentuan Anggaran Belanja Negara, peraturan valuta, dan 1001 masalah lainnya. Umum Bagi Nasir: *"Alquran maupun Sunnah hanya mengatur dasar-dasar dan pokok-pokok peraturan hubungan sesama manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluan selagi manusia itu bersifat manusia. Baik ia zaman unta ataupun zaman pesawat terbang, atau manusia zaman statosfer dan lain-lain"*.¹⁶

Islam mengatur adanya hak dan kewajiban kepala negara dengan dengan rakyatnya, begitu juga sebaliknya adanya perintah rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Islam juga mewajibkan penganutnya untuk melakukan musyawarah terhadap permasalahan yang tidak ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah demi mencapai kemaslahatan bersama. Islam memerintahkan setiap hakim harus memutuskan setiap perkara dengan adil dan bijaksana. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur tentang membayar zakat, sedekah dan larangan riba.

Menurut Iqbal, bahwa Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkan sistem pemerintahan Barat selagi itu tidak bertolak dengan rambu-rambu yang telah

¹⁵Muhammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 2001), h. 83.

¹⁶Dikutip Muhammad Iqbal dalam Natsir, *Agama dan Negara*, h. 87.

ditetapkan oleh syariat Islam. Sepanjang itu bersifat positif dan baik kita boleh mencontoh dan meniru Barat. Dalam hal ini misalnya sistem demokrasi Barat, Natsir meyakini prinsip syura' (musyawarah) dalam Islam tidak jauh berbeda dengan rumusan demokrasi modern. Dalam eksistensi parlemen sebagai representasi musyawarah dalam demokrasi, Natsir menerimanya. Namun Natsir menolak demokrasi sekuler Barat yang menjauhi nilai-nilai agama dalam bernegara. Pandangan Natsir, nilai-nilai agama seperti etika harus diutamakan dalam bernegara. Sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam bernegara harus mengitari demokrasi.

Jika dilihat bagaimana sikap Natsir terhadap pancasila melalui pidato-pidatonya di berbagai acara maupun tulisan-tulisannya di berbagai media cetak. Salah satunya, Natsir pernah berpidato di Pakistan Institute of International Affairs, Karachi pada 2 April 1952 dengan mengangkat tema *What and how can be Muslims contribute to the attainment of a stable World Peace*. Dalam pidato tersebut dia mengatakan “*Pakistan is decidedly an Islamic country by population and by choice as it has declared Islam as the State's religion. So is Indonesia an Islamic country by the fact that Islam is recognised as the religion of Indonesian people, though no expressed mention is made in one constitution to make it the state's religion. But neither has Indonesia excluded religion from statehood. In fact it has put the monotheistic creed in the one and only God, at the head of the Pantjasila –The Five Principles- adopted as the spiritual, moral countries and peoples Islam has its very essential place in our lives. Which does not mean, however, that our state-organization is theocratic.*”¹⁷ (Pakistan jelas merupakan salah satu negara Islam baik dari segi penduduknya maupun karena pilihan untuk menyatakan Islam sebagai dasar negara. Demikian pula Indonesia adalah suatu negeri Islam diakui sebagai agama negara, meskipun Undang-Undang Dasar negara (RI) tidak menyatakan sebagai agama negara. Tetapi Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Sehingga terlihat dalam sila pertama menjadikan ketuhanan yang Maha Esa diurutkan sebagai sila pertama dari pancasila sebagai landasan rohani, moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka (kedua) negeri dan rakyat kita Islam menduduki tempat yang esensial dalam kehidupan kita, hal ini tidak berarti bahwa sistem negara kita teokrasi).

¹⁷Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 194.

Kemudian dikutip dari Syadzali bahwa Natsir memuat sebuah tulisan pada majalah mingguan Hikmah yang diterbitkan pada 09 Mei 1954, dengan judul “Bertentangkah Pancasila dengan Alquran”. Dalam tulisannya itu Natsir membandingkan tiap-tiap nilai pancasila dengan ajaran Alquran. Dia bertanya mungkinkah Alquran bertentangan dengan sila pertama, sila Ketuhanan Yang maha Esa?, mungkinkah Alquraan yang ajarannya mewajibkan menegakkan ‘*adalah ijtimai’iyah*’ dapat bertentangan dengan sila keadilan?, mungkinkah Alquran yang justru memberantas sistem feodalisme dan *istibdad* (diktator), sewenang-wenang, dengan meletakkan dasar musyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan, dapat bertentangan dengan kedaulatan rakyat?, tidak mungkin Alquran yang ajarannya menegakkan *islah bainannas* (damai antara manusia) dapat bertentangan dengan Peri Kemanusiaan?, mana mungkin Alquran yaang mengakui adanya bangsa-bangsa bertentangan dengan kebangsaan.¹⁸

Keseriusan Natsir dalam memperjuangkan Islam untuk diimplementasi dalam kenegaraan mulai mengemuka ketika ia ikut tampil di perlemen sebagai anggota kontituante terlihat dalam pemilu pertama yang paling demokrasi itu yang dilaksanakan pada tahun 1955 sehingga Masyumi menempati suara kedua setelah PNI, kemudian NU dan PKI.¹⁹ Disini terlihat bahwa ada tiga kekuatan yang saling bersaing, kekuatan nasionalis-sekuler, Islam dan marxisme/sosialisme. Memang dalam pemilu ini tidak ada partai yang mutlak menang, maka ketiga kekuatan arus politik tersebut sehingga pada akhirnya hanya dua kekuatan Islam dengan pancasila yang hangat diperbincangkan di kontituante. Natsir sebagai ujung tombak kekuatan Islam sedangkan pancasila diwakili oleh Soekarno.

Natsir menyampaikan pidato dihadapan Majelis Konstituante 1957 dengan memberi dua opsi, yaitu kekuatan Islam dan sekuler. Disini pancasila adalah sekuler yang tidak mengakui wahyu adalah sebagai sumbernya. Dalam pancasila ketuhanan hanyalah rasa adanya tuhan tanpa ada wahyu. Sehingga lanjut Natsir “negara yang berdasarkan pancasila, yang terang demikian sifatnya itu, tidak dapat menjadi negara

¹⁸Setiap butir pancasila terdapat asasnya dalam Alquran. *Sila pertama*, Ketuhanan yang maha Esa (Q.S Al-Ikhlash [112] : 1); *Sila kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab (Q.S. An-Nisa [4] : 135); *Sila ketiga*, Persatuan Indonesia (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13); Sila Keempat, Permusyawaratan (Q.S. Asy-Syua’ra [42] : 38); Sila Kelima, Keadilan Sosial (Q.S. An-Nahl [16] : 90).

¹⁹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 200), h. 432-433. Lihat juga Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 62-64.

yang betul-betul mencukupi kebutuhan hidup Indonesia, bukan suatu negara yang sebagai suatu inskonstiyusi akar-akarnya nyata-nyata menghujam dalam sanubari Indonesia.

Dari sinilah terlihat nyata bahwa bahwa Natsir menegaskan bahwa Islam yang sudah berabad-abad mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga wajar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Dengan itu, Natsir terus memberikan pemahaman bahwa Islam memiliki sifat-sifat sempurna bagi kehidupan agama dan negara serta memberikan jaminan keselamatan bagi keragaman yang berbeda dengannya. Dengan kata lain umat minoritas tidak perlu khawatir kepada Islam, karena hak mereka akan dilindungi dan kebebasannya akan terjamin.²⁰

Perubahan sepiantas pandangan Natsir mengenai pancasila tidak mungkin datang begitu saja tanpa sebab. Tentunya ada faktor penyebab berubahnya pandangan Natsir mengenai pancasila sesuai dengan berjalannya waktu bagi lawan debatnya. Kita pidato di Paksitan pada tahun 1952 Natsir memandang positif tentang pancasila, baginya pancasila merupakan dasar spiritual, moral, dan etika negara bangsa Indonesia. Karena ia memandang dalam pancasila ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial, sehingga nilai-nilai semua itu tidak mungkin bertentangan dengan Islam. Lalu dua tahun berikutnya, 1954 ia menegaskan sikapnya terhadap pancasila, bahwa pada pidatonya pada peringatan Nuzulul Qur'an ia menyatakan bahwa pancasila merupakan hasil dari rumusan musyawarah para pemimpin bangsa yang sebagian besar darinya adalah beragama Islam. Tentunya semua mereka tidak mungkin merumuskan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini (Islam). Sehingga Natsir menyimpulkan bahwa *"dalam pengakuan Qur'an, Panjasila hidup subur. Satu dengan lain tidak a priori bertentangan tidak pula identik (sama)"*.²¹

Akan tetapi mengapa ia menyerang pancasila dengan habis-habisan di Konstituante, yang pada akhirnya diserang balik oleh lawan-lawan politiknya?, disinilah Iqbal memberi beberapa alasan. *Pertama*, Pancasila pada perkembangannya ibaratkan kaset kosong yang bisa diisi dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Sehingga PKI pun yang anti ketuhanan mengaku paling pancasilais dan menafsirkan pancasila sesuai keinginnya.

²⁰Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: DDII, 2000), h. 81-83.

²¹Muhammad Natsir, *Capita Selecta II*, (Bandung: Sumur, tt.) h. 69.

Kedua, dalam konteks politik pada masa itu, sah-sah saja mereka mengajukan gagasan alternatif selain dari Pancasila sesuai dengan keinginan mereka, memang itulah salah satu fungsi dari Konstituante dalam merumuskan dasar negara. Melalui Konstituante inilah masing-masing mereka baik para pendukung Pancasila dan pendukung Islam sebagai dasar negara beradu argumen secara bebas untuk memperjuangkan pandangan mereka masing-masing.

Ketiga, Natsir beserta kawan-kawan memperjuangkan keinginan mereka –Islam sebagai dasar negara- secara konstitusional.

Namun pada akhirnya perdebatan panjang di Konstituante tidak menemukan titik temu, masing-masing mempertahankan pendiriannya, sehingga Soekarno gak *sabaran* melihat kondisi ini. Akhirnya melalui dekret yang dikeluarkannya membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 45. Menurut Maarif yang dikutip Iqbal bahwa Konstituante sudah hampir menyelesaikan 90 persen. Dengan keputusan Soekarno tersebut habislah sudah perjuangan Natsir dan kawan-kawan di Konstituante menjadikan Islam sebagai dasar negara.²²

Walaupun gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, namun Natsir tidak setuju dengan cara DI/TII memperjuangkan aspirasi mereka. Natsir bahkan menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah Darul Islam dengan pemerintah republik, sehingga solusi politik tersebut dapat dicapai. Natsir mengajak mereka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dan mengajak mereka untuk bekerjasama bahu-membahu dalam membangun Indonesia. Dengan demikian mereka memperoleh kesempatan untuk memperjuangkan aspirasi politiknya secara konstitusional, damai, dan bebas.

Dari sini dapat dilihat jiwa kenegarawanan Natsir, ia tidak berfikir sempit, akan tetapi berfikir secara universal demi kepentingan bangsa Indonesia. Ia hanya menjalankan aspirasi politiknya melalui rel kereta konstitusional, yang didasari oleh etika dan moral serta jauh dari kekerasan.

Pada tahun 1958, Natsir dianggap ikut terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang dibentuk di Sumatera Barat. Latar belakang munculnya pemerintahan tandingan ini disebabkan oleh reaksi serta protes atas kebijakan Soekarno yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, bukan

²²Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektual Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 172 dalam Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam...*, h. 222.

untuk mengambil kekuasaan. Padahal PRRI dibentuk ketika Soekarno sebagai formatur kabinet, lagipula sistem pemerintahan itu berbentuk demokrasi parlementer. Namun pada akhirnya PRRI berhasil dipatahkan oleh pihak Militer yang diutus dari pusat.²³

Pada tahun 1960, Natsir ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap terlibat dalam gerakan itu. Pada tahun yang sama pula, Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena mereka menganggap bahwa banyak anggota Masyumi terlibat dalam PRRI. Enam tahun dipenjar, Natsir dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Natsir pada mulanya tidak berpandangan negatif terhadap hubungan Pancasila dengan sebagai dasar negara, pandangannya itu berubah ketika para lawan pemikir lainnya menafsirkan Pancasila sekehendak hatinya. Termasuk PKI yang nyata-nyata tidak meyakini adanya Tuhan mengaku paling Pancasila.

Natsir tidak menolak demokrasi barat, selagi itu tidak bertentangan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh nash, sehingga dikenal dengan *Teistik Demokrasi* atau istilah dari Mahfud MD *Religion City State*. Menurut pandangan Natsir, Negara akan hidup subur dalam masyarakat jika sesuai dengan sosio-kultur masyarakat itu sendiri. Maka dengan itulah Indonesia mayoritas beragama Islam maka pantas dan layak jika Islam dijadikan sebagai dasar negara.

Dari perjalanan hidup Natsir, dapat dipetik sebagai pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya menjadi seorang politikus dalam menjalankan aktivitas politiknya. Nilai-nilai yang perlu ditekankan dalam berpolitik ialah nilai moral dan etika. Natsir menalatkan politik sesuai dengan semangat ajaran agama yang dianutnya, meskipun menelan kekecewaan akibat prinsip yang lurus dan konstan yang dimilikinya.

²³M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: Serambi, 2008), h. 514-517.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Feith, Helbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press, 1962.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jatim, *Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman*, (STIAU Al-Mujtama' Pamekasan tt.
- Khaeron, Herman. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Jakarta: IKAPI, 2017.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Peta Bumi Intelektual Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1993.
- Mufti, Muslim *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Natsir, Muhammad. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 2001.
- Natsir, Muhammad. *Capita Selecta II*. Bandung: Sumur, tt.
- Natsir, Muhammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: DDII, 2000.
- Rahman, Hadi Nur. *69 Tahun Mosi Integral: Mengenang Perjuangan M Natsir*. Maret 2019.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Seri Tempo, Natsir: Politik Santun Diantara Dua Rezim*. Jakarta: Kepustakaan Polpuler Gramedia, 2011.
- Suryanegara, Amad Mansur. *Api Sejarah*. Jakarta: Suryadinasti. 2018.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2011.